



■ KETUA LPMK: RP500 RIBU.
■ PENGURUS KAMPUNG: RP350 RIBU.
■ KETUA RW: RP300 RIBU.
■ KETUA RT: RP250 RIBU.
■ PKK KECAMATAN: RP225 RIBU.
■ PKK KELURAHAN: RP200 RIBU.
■ PKK RW: RP175 RIBU.
■ PKK RT: RP150 RIBU.

- Nominal itu dihitung per triwulan dan diserahkan per semester.
- Dasar: Perwal 27/2019.
- Berlaku per 1 Januari 2020.

GRATIS/FALIZARAHMAN

Ketua LPMK Diberi Honor Rp500 Ribu

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tahun ini telah menetapkan besaran nominal yang akan dikeluarkan bagi sejumlah pelayanan masyarakat. Rencana pemberian honor bagi pelayan masyarakat itu sudah diatur melalui Peraturan Wali Kota (Perwal) 27/2019 dan mulai berlaku per 1 Januari 2020.

Nantinya para pelayan masyarakat yang akan diberi honorarium meliputi para Ketua Rukun Tetangga (RT), Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), pengurus kampung, serta Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, Ignatius Triharsono mengatakan, pemberian honorarium tersebut bukan besaran upah yang diberikan pemkot, melainkan lebih kepada apresiasi kepada para pelayan masyarakat.

Adapun besaran yang akan diberikan yakni Rp500 ribu bagi LPMK, Rp350 ribu bagi pengurus kampung, Rp300 ribu bagi RW, Rp250 ribu bagi RT, Rp225 ribu bagi PKK Kecamatan, Rp200 ribu bagi PKK Kelurahan, Rp175 ribu bagi PKK RW, serta Rp150 ribu untuk PKK RT. "Nominal itu akan dihitung per triwulan dan diserahkan per semester," jelas Kelik-sapaan akrabnya--Selasa (7/1).

Penyerahan itu akan dilakukan ke tiap-tiap kecamatan melalui transfer rekening. Kelik menyatakan, pendistribusian awal akan mulai dilakukan pada Juni mendatang. "Ketertapannya sudah demikian, jadi sesuai dengan

Honor Pelayan Masyarakat

Nominal itu akan dihitung per triwulan dan diserahkan per semester.

Triharsono
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

● ke halaman 15

Ketua LPMK

● Sumbangan Hal 9

tanggung jawab dan tugas yang diemban," urainya.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta, Octo Noor Arifat mengatakan, untuk besaran honorarium akan sepenuhnya diatur oleh tim anggaran. Pihaknya hanya berkewajiban untuk mengajukan usulan berdasarkan tingkatan kewilayahan saja. "Kami melihat pambanding stimulan administrasi RT/RW yang sebelumnya ada di belanja hibahnya kecamatan," ucap Octo.

Penetapan besaran honorarium juga akan ditetapkan melalui SK yang ditargetkan juga rampung dalam waktu dekat. Nantinya penyaluran akan dilaksanakan dalam dua tahap dalam satu tahun.

Setiap semester para pelayanan masyarakat itu bakal menerima honorarium pada akhir semester. Penerimaan itu juga akan diikuti dengan pelaksanaan teknis lain berupa laporan pertanggungjawaban, surat ketetapan, hingga dokumen lain.

Bentuk apresiasi

Terpisah, satu ketua RW di wilayah Keparakan, Deva Wahyu S. menyatakan, hal tersebut sebagai bentuk apresiasi bagi para pengurus Kampung. Namun, dia menekankan bahwa regenerasi para pengurus kampung perlu dipikirkan. Satu hal yang mungkin menjadi daya tawar adalah honorarium seperti ini.

"Sementara sekarang ini ketua RT dan RW itu sebagian besar jika sudah menjabat langsung dapat cap jabatan seumur hidup. Saya sudah periode ke-3 sebagai ketua RW. Artinya su-

dah berjalan tahun ke-10. Nanti selesai berarti sudah menjabat 12 tahun," ucapnya sembari tersenyum.

Keberadaan honorarium, menurutnya, bisa menjadi pemicu agar warga mau bergabung menjadi pengurus, menjadi pelayanan dan memikirkan kampung itu sendiri. Agar generasi muda bermunculan dan mau tampil sebagai aktivis kampung.

Sumbangkan

Supardi, Ketua RW 04 Kotabaru menyatakan, dia berkomitmen honor tersebut akan diterima kemudian disumbangkan masuk kas. Sebab, menurutnya itu bisa menimbulkan gejolak di lingkup organisasi RT, RW, LPMK, dan PKK. Karena yang bekerja di sana bukan hanya ketuanya saja. Maka dengan memasukkan honor ke kas akan menjadi lebih relevan.

Selama ini, lanjutnya,

dengan menjadi relawan pengurus kampung yang notabene tak mendapat upah, warga kerap mencibir para tokoh kampung ketika terjadi persoalan. Bagaimana jika nantinya mendapat honor, maka dikhawatirkan Supardi, nantinya warga akan lebih permisif melakukan cibiran. Dengan satu pembenarannya adalah para pengurus kampung mendapat honor.

"Sudah dibayar pemerintah, kok, *rondane isih ono maling. Wilayahe lingkungan*," ucapnya mengandaikan cibiran warga. "maka itu sejak awal saya tidak setuju (dengan honorarium). Tidak dibayar saja sudah *dipisu-pisuhi* (dimarahi), apalagi sekarang dibayar. Konsekuensinya seperti itu. Makanya sikap saya, kalau ada (honor), tak terima (kemudian) tak kasih kas," ucap Supardi. (jsf/hdy)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005